

# Analisis Prospektif Desa Patutreja Berbasis Blue Economy Development

## *(Prospective Analysis of Patutreja Village Based on Blue Economy Development)*

Rahmania Mustahidda<sup>1\*</sup>, Sugiharti Sugiharti<sup>2</sup>, Maulana Ihsan<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Jawa Tengah, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[rahmania@stietotalwin.ac.id](mailto:rahmania@stietotalwin.ac.id)<sup>1\*</sup>, [sugiharti@stietotalwin.ac.id](mailto:sugiharti@stietotalwin.ac.id)<sup>2</sup>, [maulana@stietotalwin.ac.id](mailto:maulana@stietotalwin.ac.id)<sup>3</sup>



### Riwayat Artikel

Diterima pada 1 Desember 2024

Revisi 1 pada 6 Desember 2024

Revisi 2 pada 13 Desember 2024

Revisi 3 pada 27 Desember 2024

Revisi 4 pada 7 Januari 2025

Disetujui pada 9 Januari 2025

### Abstract

**Purpose:** The blue economy is based on the principle of the sustainable use of marine resources directed at economic growth by utilizing marine-based resources. The objective of this research is to analyze the strategy structure and analyze priority strategies for Blue Economy Development in the Maritime Tourism sector in Patutreja Village with environmental, tourism, economic, and social dimensions.

**Methodology:** Data collection was carried out by determining the elements and detailing them with the help of experts based on specific expert criteria through interviews, focus group discussions, and validation. Interpretive structural modeling (ISM) and MICMAC analysis tools are used to determine elements with high driver power and low dependence values as priority strategies.

**Results:** From the results of the analysis of priority strategies in this research, they include Environmental Elements (L): Water Conservation (L1) and Carrying Capacity (L2); Tourism Elements: Tourist Attractions (P4); Economic Elements: Tourism Industry Opportunities (E1) and Retributions (E2); Social Elements: Welfare (S2); Institutional Element: Central Government Support (K1).

**Conclusions:** The analysis recommends a strategic approach to developing a blue economy in Patutreja Village by focusing on environmental conservation, institutional strengthening, and local community empowerment to support sustainable marine-based tourism. Five key elements Environment, Tourism, Economy, Social, and Institutional were assessed using the ISM-MICMAC method. High-driving, low-dependence sub-elements identified include water conservation, tourism attraction development, local economic opportunities, community welfare through creative industries, and central government support for village tourism programs.

**Limitations:** This study has limitations in that the development analysis is still general. For further research, a strategic analysis was carried out specifically in certain fields.

**Contribution:** We hope that this can be a recommendation for determining strategies for the development and sustainability of the blue economy for managers and stakeholders in the marine tourism sector.

**Keywords:** *Blue Economy, Development, Priority, Strategy, Sustainability*

**How to cite:** Mustahidda, R., Sugiharti, S., Ihsan, M. (2025). Analisis Prospektif Desa Patutreja Berbasis Blue Economy Development. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(2), 447-461.

## 1. Pendahuluan

*Prinsip Blue and Green Economy (BGE)* memiliki arti mendalam bagi perekonomian karena sumber daya yang berlimpah akan mengakibatkan berdirinya industri berbasis alam dan kelautan. Pengelolaan sumber daya tersebut dinilai dapat mengatasi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan mengembangkan sektor ekonomi kelautan, pembangunan akan merata dan dapat memecahkan masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah (Latupapua, Hiariey, Atamimi, Latuihamallo, & Latuconsina, 2022). *Blue Economy* merupakan prinsip ekonomi yang menekankan pada pengelolaan perekonomian yang berkelanjutan dan konservasi. Pernyataan ini memiliki arti bahwa lingkungan menyejahterakan laut dan potensi bahari yang sehat akan berdampak pada lingkungan produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kehidupan dan mata pencaharian yang harus seiring dengan pelestarian ekosistem sekitar pesisir (Maeyangsari, 2023). Fokus utama *blue economy* adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan dengan unsur kelautan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan laut tanpa merusak lingkungan tersebut. Hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa bidang ini telah meningkatkan perekonomian di beberapa tahun terakhir, jutaan sumber daya manusia terlibat dalam kegiatan perekonomian ini, dan diprediksi akan terus meningkat (Sverdan, 2021).

Sebagai langkah improvisasi, pemerintah mencanangkan program katalis yang melibatkan masyarakat secara langsung diantaranya optimalisasi pariwisata regional melalui program desa wisata (Hidayatullah, Windhyastiti, & Waris, 2021). Berdasarkan SK Penetapan No. 160.18/764/2022 tentang penetapan Desa Wisata, Kabupaten Purworejo memiliki 53 Desa Wisata yang hampir keseluruhannya berstatus rintisan. Desa Patutreja merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Terletak di pesisir pantai selatan dengan luas wilayah 340,148 ha dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia (Yahya, 2016). Dengan kondisi geografis tersebut, Desa Patutreja memiliki daya tarik berbasis bahari seperti kawasan wisata Pantai Jetis dan Garam Koros sebagai komoditas khas nya. Seiring berjalannya waktu tempat produksi komoditas Garam Koros dikembangkan menjadi obyek wisata baru berupa wisata edukasi dan kesehatan. Penguatan SDGs di kawasan desa melalui *blue economy* berdampak positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Afnan, Wijaya, Kartono, & Wibowo, 2024).

Dengan adanya potensi tersebut, Desa Patutreja masih dinyatakan sebagai desa wisata rintisan yang berarti masih memerlukan pengelolaan yang optimal, kebijakan yang tepat dan bersifat membangun, serta perlu meningkatkan peran masyarakat dalam rangka menuju pembangunan desa yang berkelanjutan di sektor pariwisata bahari. Menurut data, keberadaan potensi wisata bahari di Kabupaten Purworejo masih belum mampu mendongkrak jumlah wisatawan serta intensitas berkunjung pada obyek wisata bahari. Obyek wisata bahari di Kabupaten Purworejo belum termasuk kedalam destinasi wisata bahari favorit di Jawa Tengah. Sumber penerimaan pendapatan pada sektor pariwisata dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut. Semakin banyak wisatawan maka akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan daerah dan manfaat ekonomi di kawasan tersebut (Ndjurumbaha, Tiwu, & Ballo, 2024). Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wibawa & Budiasa, 2018). Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-6 dalam hal kunjungan wisata di lingkup Jawa Tengah. Memiliki tren menurun sejak tahun 2020 dan jumlah wisatawan asing menurun secara drastis pada tahun 2021 dan 2022 (Dispropar, 2023).

Stakeholder adalah bagian penting untuk menentukan strategi dan tujuan keberlanjutan melalui indikator yang menjadi pijakan keberlanjutan (Wardono, Muhartono, Hikmayani, Apriliani, & Hikmah, 2019). Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemangku kepentingan dalam aspek penyeimbangan manfaat ekonomis dari kepariwisataan, penyeimbangan pemanfaatan sumber daya lingkungan dengan perubahan nilai sosial dan masyarakat lokal yang disebabkan penggunaan sumber daya lingkungan dan Penyeimbangan pertumbuhan ekonomi pada nilai sosial dan masyarakat lokal (Sulistyadi, Eddyono, & Entas, 2021). Lembaga dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melibatkan kegiatan konservasi lingkungan dan keberlanjutan (Orajekwe & Ogbodo, 2023). Manajemen proyek dibutuhkan untuk membangun

lingkungan pesisir secara berkelanjutan dilakukan pada berbagai aspek termasuk aspek sosial. Berbagai tantangan seperti antisipasi konflik lahan, staffing, dan penentuan program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (Yopie & Febriana, 2024).

Pengembangan ekonomi lokal muncul sebagai suatu konsep yang fokus pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan peningkatan peran oleh masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok kelembagaan yang ada dimasyarakat sebagai bagian dari kelembagaan lokal (Siregar, Daulay, Sabrina, Aramita, & Tarigan, 2024). Kelembagaan lokal pada dasarnya berfungsi untuk memberikan layanan sosial yang bermanfaat untuk menyejahterakan komunitas lokal melalui peluang atau tindakan kolektif sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (Aliim & Darwis, 2023). Pengelolaan sumber daya dan potensi alam lokal memerlukan peran pemerintah sebagai regulator, penyedia aksesibilitas dan amenities. Masyarakat mengambil peran sebagai inisiator melalui ide dan gagasannya untuk menggaungkan potensi wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan dan mendukung keberlanjutan (Juliyanti, Syarifuddin, & Rahmawati, 2023). Peran para stakeholder diantaranya dalam strategi yang berfokus dalam maksimalisasi efisiensi. Strategi dan tujuan harus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan yang memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga kinerja keberlanjutan tercapai (Zulaecha & Murtanto, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis strategi dan Prospek Pengembangan Potensi Bahari Desa Patutrejo melalui pendekatan Blue Economy Development dengan dimensi lingkungan, kepariwisataan, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang melibatkan multipihak sehingga dapat menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan sumber daya bahari berbasis blue economy.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Blue Economy**

*Blue Economy Development* adalah suatu konsep ekonomi yang berfokus pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan menciptakan lapangan kerja, sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Konsep ini mengacu pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara maksimalisasi lapangan pekerjaan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan dan pesisir. Blue economy sendiri telah berkembang dan menjangkau sektor selain perikanan, diantaranya adalah pariwisata bahari yang memiliki segmen cukup besar. Blue economy dalam pariwisata Bahari memiliki arti pengembangan pariwisata pesisir yang berpeluang untuk menghasilkan keuntungan ekonomi melalui partisipasi masyarakat sekitar pesisir (Tegar & Gurning, 2018).

Pengembangan *blue economy* di sektor pariwisata dapat dilakukan melalui pengembangan destinasi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi terhadap lingkungan perairan dan pesisir. Hal ini dilakukan sebagai upaya substraksi berbagai tantangan pengembangan destinasi seperti polusi dan eksploitasi sumber daya yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi para pemangku kepentingan (Airawati, Fauzi, & Putranto, 2023).

### **2.2 Pariwisata Bahari**

Pariwisata Bahari merupakan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan letak geografis pesisir yang memanfaatkan sumber daya di sekitar lingkungan bahari sebagai daya tarik wisata. Kegiatan pariwisata bahari meliputi berbagai aktifitas rekreatif di sekitar pesisir maupun Pantai (Darmawan, Kholifah, & Angraini, 2024). Desa merupakan salah satu obyek Pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena merupakan integral dari struktur sosial dan ekonomi negara. Dalam pembangunannya, berpotensi memberi dampak positif komprehensif terhadap kualitas hidup masyarakatnya dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan melalui berbagai macam sektor ekonomi salah satunya sektor pariwisata (Pradanna, Irawan, & Bestari, 2024). Pengembangan pariwisata bahari memerlukan strategi pendukung diantaranya pengelolaan berkelanjutan dengan prinsip konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dengan Pendidikan dan pelatihan untuk

peningkatan kapasitas manajerial pariwisata bahari, serta kolaborasi para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan regulasi yang ideal bagi pengembangan pariwisata bahari yang menguntungkan dan ramah lingkungan (Donesia, Widodo, Saragih, & Suwarno, 2023). Pariwisata bahari berperan secara signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pariwisata dan pajak hotel. Selain itu keterlibatan dan kolaborasi masyarakat juga penting untuk keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi setempat melalui profesi pendukung usaha pariwisata (Anarta & Darwis, 2024). Strategi pengembangan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan, promosi, peningkatan ekonomi kreatif, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola pariwisata bahari. Upaya ini juga didukung oleh keterlibatan Masyarakat dan pemerintah pusat, daerah dan Lembaga lokal melalui pembuatan kebijakan dan Keputusan.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Struktural Prospektif (PSA) berfungsi untuk menganalisis keterkaitan dan pengaruh antar variabel pada multi dimensi yaitu dimensi lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan kepariwisataan, serta mengklasifikasikan variabel yang relevan sebagai penyusun strategi optimal (Wardono et al., 2019). Penelitian ini bersifat *mix method* dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen, laporan, atau arsip yang relevan dengan pengelolaan blue economy di wilayah tersebut serta FGD yang melibatkan pakar yang telah terpilih. Diskusi ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi, tantangan, dan potensi dalam pengelolaan blue economy di Patutrejo. Selanjutnya keterangan dan data hasil FGD diolah dengan menggunakan *Interpretive Structural Modelling* (ISM) dan MICMAC dengan tujuan untuk merekomendasikan urutan prioritas strategi pengembangan *blue economy* di bidang Pariwisata Bahari Desa Patutrejo. Pengumpulan data dilakukan dengan menentukan elemen dan dan merincinya dengan bantuan pakar.

Subjek penelitian terdiri dari pihak atau stakeholder yang terlibat langsung dalam pengelolaan blue economy. Sampel penelitian diambil dengan menentukan kriteria pakar secara kekhususan, melibatkan 5 orang pakar untuk memastikan presisi hasil penelitian. Kriteria pakar meliputi pengalaman, keahlian di bidang blue economy, serta keterlibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya di Patutrejo. berdasarkan kriteria pakar khusus, pengelola pariwisata bahari setempat (Pokdarwis), pemerintah desa, dan pengelola destinasi. terdapat lima elemen diantara lain elemen lingkungan, kepariwisataan, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan menggunakan unsur VAXO dalam pengukurannya. Berikut ini merupakan langkah – langkah analisis data yakni penyusunan *contextual relationship* pada sub elemen hasil *breakdown* dengan para pakar, penyusunan *self interaction matrix*, penyusunan *reachability matrix*, penyusunan *level partitions* dari *final reachability matrix*, penyusunan *diagraph* atau hirarki, penyusunan *driving power* dan *dependence diagram*, dan representasi melalui matrix MICMAC

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Breakdown Elemen Pengembangan Blue Economy

Tabel 1. Pengembangan Blue Economy

Elemen Pengembangan	Breakdown Elemen Pengembangan
<b>Elemen Lingkungan (L)</b>	
<b>Konservasi Perairan (L1)</b>	belum memiliki kawasan yang secara resmi ditetapkan sebagai area konservasi perairan yang signifikan. Namun tetap dilakukan upaya konservasi perairan dengan penetapan zonasi tambak untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan keberlanjutan perairan pesisir.
<b>Daya Dukung (L2)</b>	Perencanaan master plan pelebaran jalan akses masuk

<b>Kualitas (L3)</b>	Perairan dan wilayah yang minim polusi, banyak terdapat fasilitas penunjang, keberadaan informasi pariwisata yang jelas, alokasi tiket yang jelas dan transparan, pengelola yang sudah profesional, peningkatan kepuasan pengunjung melalui penyediaan atraksi wisata, dari sisi partisipasi Masyarakat berupa penjualan souvenir lokal, pengelolaan produk lokal seperti seafood dan hasil bumi, dari sisi budaya terdapat waktu dan tempat khusus untuk pertunjukan budaya lokal
<b>Konservasi SDA (L4)</b>	Reboisasi bibir Pantai
<b>Ancaman Bencana (L5)</b>	Mitigasi dan pelatihan penanganan bencana dari BPBD

#### **Elemen Kepariwisataaan (P)**

<b>Aksesibilitas (P1)</b>	Letak Strategis, penggunaan jalur baru untuk <i>entrance</i>
<b>Daya Tarik (P2)</b>	Wisata alam Bahari, wisata edukasi dan wisata kesehatan
<b>Fasilitas (P3)</b>	Penyediaan fasilitas wisata yang ideal (panggung hiburan, kelengkapan atraksi wisata, <i>tour guide, event organizer</i> )
<b>Atraksi Wisata (P4)</b>	Outbond, tour desa wisata, wisata edukasi dan kesehatan
<b>Tata Kelola (P5)</b>	Sinergi Pokdarwis, Posyantek, kelompok tani, kelompok usaha garam dan pemerintah desa
<b>Strategi Promosi (P6)</b>	Media online dan multievent gelar desa wisata
<b>Keunikan (P7)</b>	Mempunyai wisata edukasi dan pengobatan alternatif terapi garam

#### **Elemen Ekonomi (E)**

<b>Peluang Industri Wisata (E1)</b>	Langkah pengembangan paket tour desa wisata.
<b>Retribusi (E2)</b>	Ticketing dan Pengelolaan retribusi untuk UMKM di lingkup tempat wisata
<b>Pendapatan Warga (E3)</b>	Melalui sektor pariwisata (UMKM, lahan parkir, fasilitas wisata seperti ATV, kolam renang, dll)
<b>Kewirausahaan (E4)</b>	Inovasi pengelolaan komoditas khas desa (hasil pertanian dan Perkebunan) dan ekonomi kreatif (pengrajin)
<b>Bisnis Lokal (E5)</b>	Mendukung produksi lokal melalui program desa wisata dan Posyantek
<b>Willingness to Pay (E6)</b>	Penetapan harga yang masih terjangkau
<b>Alokasi Pendanaan Wisata (E7)</b>	Pengelolaan retribusi untuk pendapatan desa dan pengembangan obyek wisata

#### **Elemen Sosial (S)**

<b>Partisipasi Masyarakat Lokal (S1)</b>	Pokdarwis, Posyantek, paguyuban UMKM dan kelompok usaha garam
<b>Kesejahteraan (S2)</b>	Peningkatan pendapatan warga di lingkup obyek wisata dan produksi lokal melalui promosi dan ekspo.
<b>Peluang Lapangan Kerja (S3)</b>	Tenaga pendukung pariwisata dan Ekonomi kreatif
<b>Konservasi Budaya (S4)</b>	Pelestarian Tari Dolalak
<b>Konflik Kepentingan (S5)</b>	Meminimalisir konflik melalui kejelasan tupoksi dengan SK, Sertifikat pendukung batas wilayah dan kepemilikan lahan.

#### **Elemen Kelembagaan (K)**

<b>Dukungan Pemerintah Pusat (K1)</b>	Pengembangan melalui program desa wisata.
<b>Dukungan Pemerintah Lokal (K2)</b>	Bantuan pelatihan pengelolaan wisata (pengelolaan, keamanan, digital marketing, pemandu wisata)

<b>Dukungan Lembaga Lokal (K3)</b>	Sinergi desa dan Lembaga lokal pendukung dalam pengembangan desa wisata rintisan
<b>Kesiapan Regulasi (K4)</b>	Peraturan Pemerintah, tata kelola kelembagaan desa wisata, regulasi lingkungan, regulasi budaya dan kearifan lokal (pelestarian tarian, HAKI) peraturan ekonomi dan pembagian keuntungan, regulasi pariwisata berkelanjutan (Pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata dan pengelolaan wisata)
<b>Koordinasi dan Kolaborasi antar Lembaga (K5)</b>	Pokdarwis bersama pemerintah desa melakukan promosi potensi wisata melalui media sosial, festival budaya, atau pameran wisata regional dan nasional. Kolaborasi ini memperkuat citra desa wisata di tingkat yang lebih luas.

Sumber: Data penelitian (2024)

#### 4.2 Menyusun Hubungan Kontekstual dengan Structural Self-Interaction Matrix

Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) metode penyusunan kontekstual strategi pengembangan *blue economy*. Matriks disusun berdasarkan pendapat dan rekomendasi pakar khusus di bidang pengelolaan potensi *blue economy* di bidang pariwisata Bahari Desa Patutrejo. Menggunakan empat simbol untuk menggambarkan arah hubungan antar strategi pengembangan, antara lain:

- V : Strategi *i* lebih prioritas atau lebih dominan dilakukan dari strategi *j*
- A : Strategi *j* lebih prioritas atau lebih dominan dilakukan dari strategi *i*
- X : Strategi *j* dan *i* sama-sama prioritas atau dominan dilakukan
- O : Strategi *j* dan *i* sama-sama tidak prioritas atau dominan dilakukan

Matriks ini bertujuan untuk menghubungkan dan membandingkan persepsi responden mengenai hasil *breakdown* elemen.

#### 4.3 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Lingkungan

Tabel 2. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Lingkungan

	L1	L2	L3	L4	L5
L1		V	V	X	V
L2			V	V	V
L3				X	V
L4					X
L5					

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 2, menunjukkan hierarki tindakan yang harus dilakukan terkait elemen-elemen lingkungan. Tindakan konservasi lingkungan menjadi prioritas utama, karena berdampak langsung pada daya dukung, kualitas lingkungan, dan mitigasi ancaman bencana. Pada saat yang sama, konservasi SDA memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan konservasi lingkungan dan ancaman bencana, sehingga membutuhkan pendekatan bersamaan. Dalam banyak kasus, daya dukung lingkungan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum tindakan pada elemen lain.

#### 4.4 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Kepariwisataaan

Tabel 3. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Kepariwisataaan

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
P1		A	A	A	X	V	V
P2			V	V	X	X	X
P3				X	X	X	V
P4					V	V	V
P5						X	X
P6							V

---

**P7**

---

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 3, menunjukkan bahwa pengembangan elemen kepariwisataan perlu memperhatikan prioritas antara elemen-elemen yang saling berhubungan. Daya tarik (P2) dan atraksi wisata (P4) menjadi elemen utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata. Aksesibilitas (P1) dan strategi promosi (P6) menjadi penting setelah elemen-elemen utama sudah dikembangkan. Keunikan (P7), meskipun berada di posisi akhir, tetap menjadi elemen yang sangat penting dan harus diperkuat karena berkaitan erat dengan daya saing destinasi.

#### **4.5 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Ekonomi**

Tabel 4. *Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Ekonomi*

	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>	<b>E7</b>
<b>E1</b>		V	X	V	X	V	V
<b>E2</b>			V	V	V	V	X
<b>E3</b>				V	A	A	A
<b>E4</b>					X	O	V
<b>E5</b>						V	V
<b>E6</b>							V
<b>E7</b>							

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 4, menunjukkan bahwa peluang industri wisata (E1) dan retribusi (E2) menjadi elemen utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi pariwisata. Kedua elemen ini memiliki pengaruh besar terhadap elemen lainnya. Pendapatan warga (E3) meskipun penting, dianggap sebagai hasil dari pengembangan yang efektif dari elemen-elemen lain seperti bisnis lokal, willingness to pay, dan alokasi pendanaan wisata. Kewirausahaan (E4) dan bisnis lokal (E5) memainkan peran kunci dalam mendukung ekonomi pariwisata secara berkelanjutan.

#### **4.6 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Sosial**

Tabel 5. *Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Sosial*

	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S4</b>	<b>S5</b>
<b>S1</b>		A	A	V	X
<b>S2</b>			V	V	X
<b>S3</b>				O	O
<b>S4</b>					O
<b>S5</b>					

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 5, menunjukkan bahwa kesejahteraan (S2) dan partisipasi masyarakat lokal (S1) adalah dua elemen penting yang perlu diperhatikan lebih dulu dalam pengembangan sosial. Meningkatkan kesejahteraan akan membantu memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dan membuka peluang untuk mengatasi konflik kepentingan. Peluang lapangan kerja (S3) dan konservasi budaya (S4) cenderung kurang mendesak, meskipun tetap penting dalam jangka panjang. Manajemen konflik (S5) perlu diperhatikan bersama dengan partisipasi dan kesejahteraan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sosial berjalan dengan baik tanpa menimbulkan friksi dalam komunitas lokal.

#### 4.7 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Kelembagaan

Tabel 6. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Elemen Kelembagaan

	K1	K2	K3	K4	K5
K1		V	V	V	X
K2			X	V	X
K3				V	X
K4					X
K5					

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 6, menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat (K1) menjadi elemen yang paling mendominasi dan memiliki pengaruh besar dalam sistem kelembagaan. Dukungan ini diperlukan sebelum elemen-elemen lain seperti dukungan dari pemerintah lokal dan lembaga lokal bisa bekerja dengan optimal. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga (K5) juga memegang peranan penting dan harus seimbang dengan regulasi yang kuat (K4) untuk memastikan stabilitas kelembagaan. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah pusat, lokal, dan lembaga-lembaga lokal perlu diperkuat melalui regulasi yang matang dan koordinasi yang efisien.

#### 4.8 Menyusun Reachability Matrix

Tahap Reachability Matrix dalam Interpretive Structural Modelling (ISM) adalah langkah pengembangan yang dilakukan setelah penyusunan Structural Self Interaction Matrix (SSIM) berdasarkan pada elemen – elemen dan hubungannya dengan mengubah simbol-simbol yang ada dalam SSIM (V, A, X, O) menjadi angka biner (0 dan 1). Proses ini dilakukan dengan aturan substitusi yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Gorzen-Mitka, 2019):

- 1) Jika muncul V di matriks SSIM pada elemen  $(i, j)$  dituliskan 1. pada elemen  $(j, i)$  dituliskan 0 di tabel *intial reachability matrix*.
- 2) Jika muncul A di matriks SSIM pada elemen  $(i, j)$  dituliskan 0. pada elemen  $(j, i)$  dituliskan 1 di tabel *intial reachability matrix*.
- 3) Jika muncul X di matriks SSIM pada elemen  $(i, j)$  dituliskan 1. pada elemen  $(j, i)$  dituliskan 1 di tabel *intial reachability matrix*.
- 4) Jika muncul O di matriks SSIM pada elemen  $(i, j)$  dituliskan 0. pada elemen  $(j, i)$  dituliskan 0 di tabel *intial reachability matrix*.

*Reachability matrix* digunakan sebagai bahan untuk menghitung *driver power* dan *dependence* masing-masing elemen, digunakan juga dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci dan faktor yang bergantung pada faktor lain (Gorzen-Mitka, 2019). Berikut hasil pengolahan data dari matriks SSIM menjadi *reachability matrix*. Setelah *Reachability Matrix* tersusun, maka langkah selanjutnya adalah analisa *Final Reachability Matrix* menggunakan penerapan konsep transitivitas. Adapun hukum transitivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika variabel X berpengaruh pada variabel Y, dan variabel Y berpengaruh terhadap variabel Z, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Z. hal ini dilakukan untuk memastikan semua hubungan sub elemen tercakup dalam matriks (Rusyiana, 2018).

Berikut hasil Analisa *Final Reachability Matrix* beserta hasil perhitungan *driver power* dan *dependence* masing-masing elemen:

Tabel 7. Final Reachability Matrix Elemen Lingkungan

	L1	L2	L3	L4	L5	Driving Power	Rank
L1	1	1	1	1	1	5	1
L2	0	1	1	1	1	4	2
L3	0	0	1	1	1	3	3
L4	1	0	1	1	1	4	2

<b>L5</b>	0	0	0	1	1	2	4
<b>Dependence</b>	2	2	4	5	5		

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 8. Final Reachability Matrix Elemen Kepariwisataaan

	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>Driver Power</b>	<b>Rank</b>
<b>P1</b>	1	0	0	0	1	1	1	4	4
<b>P2</b>	1	1	1	1	1	1	1	7	1
<b>P3</b>	1	0	1	1	1	1	1	6	2
<b>P4</b>	1	0	1	1	1	1	1	6	2
<b>P5</b>	1	1	1	0	1	1	1	6	2
<b>P6</b>	0	1	1	0	1	1	1	5	3
<b>P7</b>	0	1	0	0	1	0	1	3	5
<b>Dependence</b>	5	4	5	3	7	7	7		

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 9. Final Reachability Matrix Elemen Ekonomi

	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>	<b>E7</b>	<b>Driver Power</b>	<b>Rank</b>
<b>E1</b>	1	1	1	1	1	1	1	7	1
<b>E2</b>	0	1	1	1	1	1	1	6	2
<b>E3</b>	1	0	1	1	1	0	1	5	3
<b>E4</b>	0	0	0	1	1	1	1	4	4
<b>E5</b>	1	0	1	1	1	1	1	6	2
<b>E6</b>	0	0	1	0	0	1	1	3	5
<b>E7</b>	0	1	1	0	0	0	1	3	5
<b>Dependence</b>	3	3	6	5	5	5	7		

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 10. Final Reachability Matrix Elemen Sosial

	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S4</b>	<b>S5</b>	<b>Driver Power</b>	<b>Rank</b>
<b>S1</b>	1	0	0	1	1	3	2
<b>S2</b>	1	1	1	1	1	5	1
<b>S3</b>	1	0	1	0	0	2	3
<b>S4</b>	0	0	0	1	0	1	4
<b>S5</b>	1	1	0	0	1	3	2
<b>Dependence</b>	4	2	2	3	3		

Sumber: Data penelitian (2024)

Tabel 11. Final Reachability Matrix Elemen Kelembagaan

	<b>K1</b>	<b>K2</b>	<b>K3</b>	<b>K4</b>	<b>K5</b>	<b>Driver Power</b>	<b>Rank</b>
<b>K1</b>	1	1	1	1	1	5	1
<b>K2</b>	0	1	1	1	1	4	2
<b>K3</b>	0	1	1	1	1	4	2
<b>K4</b>	0	0	0	1	1	2	3
<b>K5</b>	1	1	1	1	1	3	1
<b>Dependence</b>	2	4	4	5	5		

Sumber: Data penelitian (2024)

#### 4.9 Menyusun Level Partition

Tabel *Final Reachability Matrix* selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan *level partition*, di proses ini teknik yang digunakan adalah iterasi, yaitu dengan cara mengeliminasi secara bertahap nilai – nilai yang tidak perlu dalam matriks dengan ketentuan menghapus nilai *reachability set* yang paling banyak bersesuaian dengan *intersection set* disertai mengeliminasi antecedent set dan intersection set nya, dilakukan secara bertahap hingga mendapatkan nilai final level partition (Kumar & Singh, 2019). Unsur dalam *level partition* antara lain (Jayant & Azhar, 2014):

- 1) *Reachability Set*: Elemen yang dapat dicapai oleh elemen lain, termasuk elemen itu sendiri.
- 2) *Antecedent Set*: Elemen yang dapat mencapai elemen lain, termasuk elemen itu sendiri.
- 3) *Intersection Set*: Elemen yang terdapat dalam reachability dan antecedent set.

Elemen yang memiliki nilai tinggi dalam *reachability set* dan *antecedent set* ditempatkan pada level yang lebih tinggi, sedangkan elemen yang memiliki nilai rendah ditempatkan level yang lebih rendah (Arismawati & Vanany, 2023). Berikut hasil akhir tahap penyusunan *level partition* pada masing – masing elemen:

Tabel 12. Final Level Partition

Elemen	Kode	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set
Lingkungan	L1	1	1	1
Kepariwisataan	P2	2	2	2
Ekonomi	E1	1	1	1
Sosial	S1	1	1	1
	S2	2	2	2
Kelembagaan	K1	1	1	1

Sumber: Data penelitian (2024)

#### 4.10 Penyusunan Hierarki Struktural

Dalam konteks *Interpretive Structural Modelling*, hirarki merupakan representasi elemen – elemen terkait secara grafis, mengacu pada elemen yang terorganisir dan tersusun secara logis melalui *Structural Self-Interaction Matrix* (SSIM) didukung *reachability matrix* untuk menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung antar sub elemen. Sub elemen yang memiliki nilai tinggi akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh elemen yang memiliki nilai lebih rendah. Hirarki struktural bertujuan untuk memperjelas dan menyederhanakan kompleksitas hubungan antara elemen dan sub elemen dalam suatu sistem. Hirarki disusun berdasarkan output program *Interpretive Structural Modelling* yang telah membentuk sub elemen pada tingkatan level tertentu (Rusyiana, 2018).

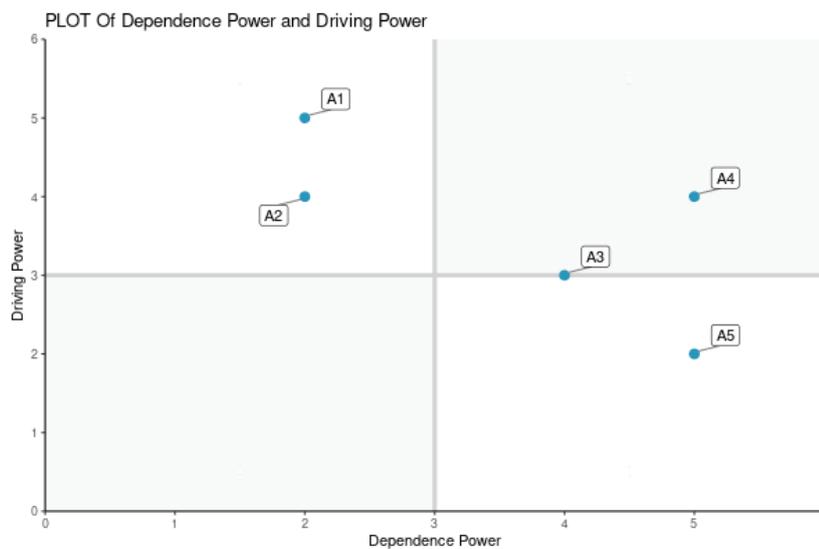
Hirarki struktural yang telah tersusun ditransformasikan ke dalam model ISM dengan cara menetapkan variabel nodes (Zhou, Ma, Lei, & Jun, 2024). Variabel nodes digantikan dengan pernyataan yang merepresentasikan visual dari struktur hirarki itu sendiri. Pada model ini menunjukkan hubungan setiap sub elemen, apakah mempengaruhi atau dipengaruhi oleh elemen lain, sehingga memberikan dasar yang jelas dalam pengambilan Keputusan atau penentuan strategi. Model yang telah terbentuk perlu di validasi mengenai ketepatan nya dengan pendapat pakar. Apabila terjadi inkonsistensi maka proses harus kembali diulang di tahap SSIM. Penentuan variabel kunci didasarkan pada nilai *driver power* yang tinggi dan nilai *dependence* yang rendah (Fakhrina, Munandar, & Dirdjosuparto, 2017).

#### 4.11 MICMAC Analysis

Analisis MICMAC (*Matrix Intersection, Cross Multiplication and Analysis of Cross Multiplication*) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kerangka komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan sub elemen yang berpengaruh pada sistem yang kompleks dalam pengambilan keputusan secara strategis melalui *driving power* (daya kendali) dan *dependency classification* (klasifikasi ketergantungan). Dalam program MICMAC terdapat empat kluster yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

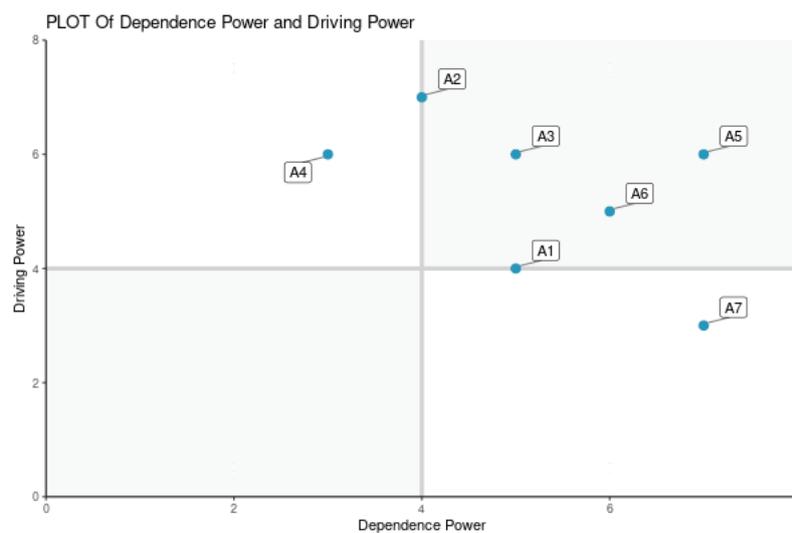
- 1) Kuadran 1: *Autonomous Indicator*. Memiliki nilai *driver power* atau daya kendali dan *dependence* atau ketergantungan yang lemah. Kedua faktor tersebut bersifat terisolasi, ditangani dengan cara terpisah, cenderung tidak terkait dengan indikator lain.
- 2) Kuadran 2: *Dependence Indikator*. Memiliki nilai *driver power* atau daya kendali lemah namun *dependence* atau ketergantungannya kuat.
- 3) Kuadran 3: *Linkage Indikator*. Memiliki nilai *driver power* atau daya kendali dan *dependence* atau ketergantungan yang kuat sehingga keduanya penting bagi stabilitas sistem.
- 4) Kuadran 4: *Independence Indikator*. Memiliki nilai *driver power* atau daya kendali kuat namun *dependence* atau ketergantungannya lemah. Keduanya kurang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga menjadikan faktor tersebut sebagai pendorong sistem.

Berikut Hasil analisis MICMAC pada masing – masing elemen:



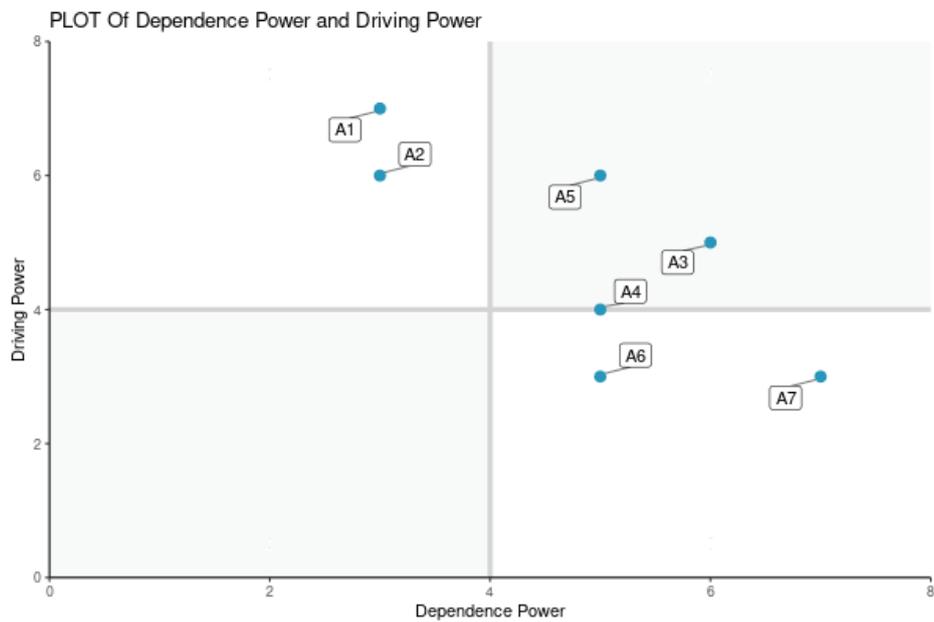
Gambar 1. Diagram Driver-Dependence Power Elemen Lingkungan  
Sumber: Data diolah (2024)

Sub elemen yang memiliki daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah di antara lain, Konservasi Perairan (L1) dan Daya Dukung (L2) berupa masterplan pelebaran jalan masuk.



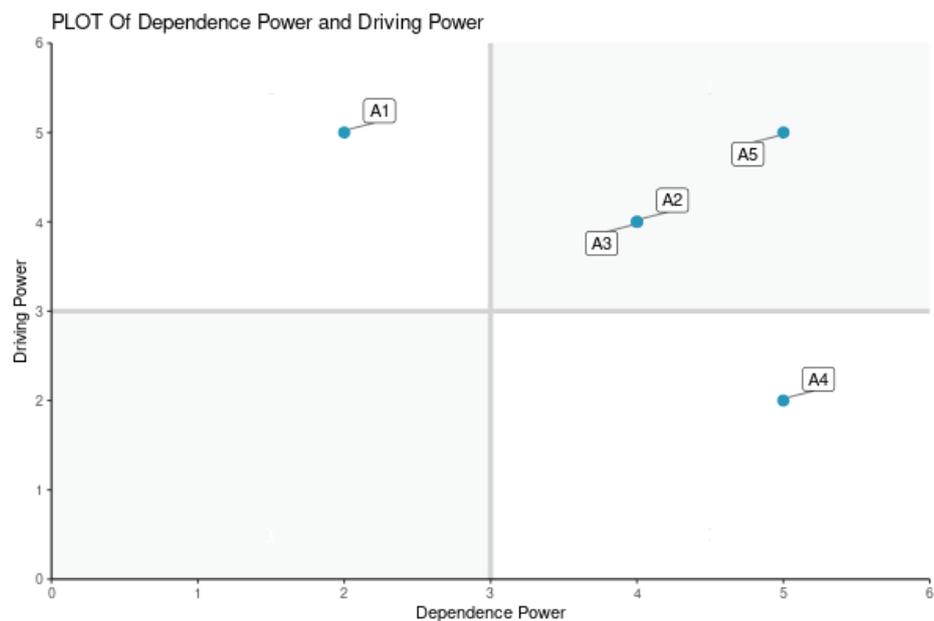
Gambar 2. Diagram Driver-Dependence Power Elemen Kepariwisata  
Sumber: Data diolah (2024)

Sub elemen yang memiliki daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah diantaranya lain Atraksi Wisata (P4) melalui peningkatan atraksi wisata berupa outbond, tour desa wisata, wisata edukasi dan Kesehatan.



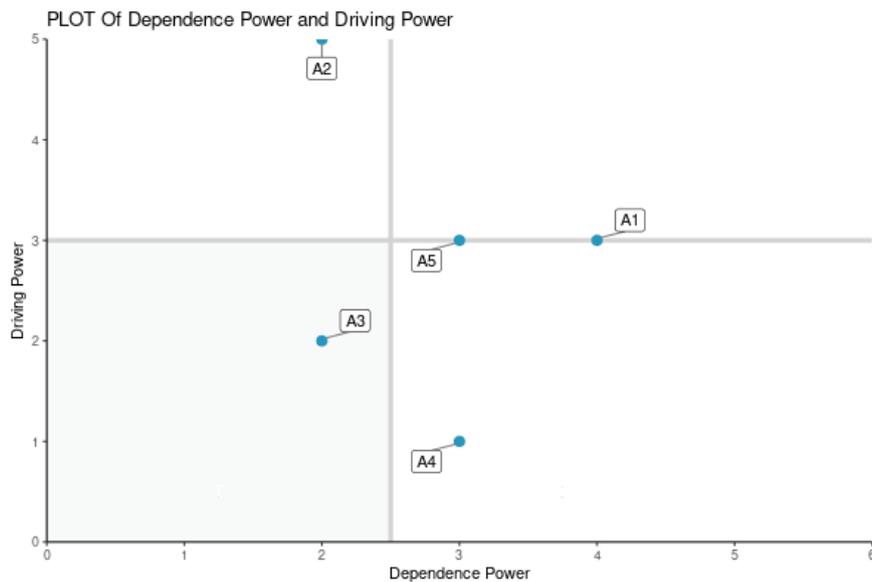
Gambar 3. Diagram Driver-Dependence Power Elemen Ekonomi  
Sumber: Data diolah (2024)

Sub elemen yang memiliki daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah diantaranya lain : Peluang Industri Wisata (E1) dengan pengembangan program tour desa wisata dan Retribusi (E2) melalui pengelolaan ticketing dan retribusi UMKM sekitar destinasi.



Gambar 4. Diagram Driver-Dependence Power Elemen Sosial  
Sumber: Data diolah (2024)

Sub elemen yang memiliki daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah diantara lain: Kesejahteraan (S2) dengan optimalisasi ekonomi kreatif melalui produk lokal dan UMKM di destinasi melalui upaya promosi.



Gambar 5. Diagram Driver-Dependence Power Elemen Kelembagaan  
Sumber: Data diolah (2024)

Sub elemen yang memiliki daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah diantara lain: Dukungan Pemerintah Pusat (K1) melalui actuating program desa wisata.

## 5. Kesimpulan

Hasil analisis penelitian memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan *blue economy* yang berbasis pada konservasi lingkungan, penguatan elemen kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Patutrejo, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dan pengelola destinasi wisata bahari dalam menciptakan keberlanjutan pariwisata berbasis bahari. Terdapat lima elemen yang dianalisis dalam penelitian ini diantaranya Lingkungan, Kepariwisata, Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis ISM-MICMAC sub elemen yang memiliki daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah diantara lain yakni; Elemen Lingkungan (L): Konservasi Perairan (L1) dan Daya Dukung (L2) berupa masterplan pelebaran jalan masuk. Elemen Kepariwisata: Atraksi Wisata (P4) melalui peningkatan atraksi wisata berupa *outbond*, tour desa wisata, wisata edukasi dan Kesehatan. Elemen Ekonomi: Peluang Industri Wisata (E1) dengan pengembangan program tour desa wisata dan Retribusi (E2) melalui pengelolaan ticketing dan retribusi UMKM sekitar destinasi. Elemen Sosial: Kesejahteraan (S2) dengan optimalisasi ekonomi kreatif melalui produk lokal dan UMKM di destinasi melalui upaya promosi dan ekspo. Elemen Kelembagaan: Dukungan Pemerintah Pusat (K1) melalui *actuating program* desa wisata.

### Limitasi dan Studi Lanjutan

Output penelitian berupa rekomendasi strategi pengembangan *blue economy* masih bersifat general. Untuk penelitian selanjutnya fokus penelitian akan dilakukan secara spesifik dan berkaitan dengan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam strategi pengembangan *blue economy*.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemendikbudristek atas kesempatan dan dukungan pendanaan melalui Program Penelitian Dosen Pemula (PDP), yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan apresiasi tinggi kepada Desa

Patutrejo, Pokdarwis Jetis Manis dan pihak-pihak pendukung dalam pengembangan blue economy sektor pariwisata bahari yang lain atas izin dan informasinya.

## Referensi

- Afnan, D., Wijaya, M., Kartono, D. T., & Wibowo, A. (2024). Sustainability Strategy: Strengthening SDGs Desa Through CSR Communication Program. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 5(3), 179-190. doi:<https://doi.org/10.35912/joste.v5i3.1726>
- Airawati, M. N., Fauzi, I., & Putranto, A. (2023). Potensi Penerapan Ekonomi Biru dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 133-149. doi:<http://dx.doi.org/10.15578/marina.v9i2.12723>
- Aliim, T. F., & Darwis, R. S. (2023). Peran Kelembagaan Lokal dalam Mengkoordinasikan Pendayagunaan Sumber Daya pada Desa Wisata. *Share: Social Work Journal*, 13(2), 248-258. doi:<https://doi.org/10.24198/share.v13i2.51198>
- Anarta, F., & Darwis, R. S. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Bagian dari Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Mengembangkan Desa Wisata. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 212-220. doi:<https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.59114>
- Arismawati, P., & Vanany, I. (2023). Risk Linkage Model for Cooking Oil Supply Chain. *Prozima: Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering*, 7(2), 143-153. doi:<https://doi.org/10.21070/prozima.v7i2.1585>
- Darmawan, R., Kholifah, N., & Angraini, Y. S. (2024). Pengembangan Aktivitas Wisata Edukasi Bahari di Pulau Pari. *JPP (Jurnal Pendidikan dan Perhotelan)*, 4(1), 49-58. doi:<https://doi.org/10.21009/jppv4i1.06>
- Dispropar. (2023). *Profil dan Data Desa Wisata Tahun 2023*. Jawa Tengah: Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Konsep Blue Economy dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950-1959. doi:<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5548>
- Fakhrina, Z., Munandar, J. M., & Dirdjosuparto, S. (2017). Evaluasi Implementasi Balanced Scorecard pada Departemen Manajemen IPB Sebagai Program Studi Berbasis Kinerja. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 8(2), 103-118. doi:<https://doi.org/10.29244/jmo.v8i2.19489>
- Corzen-Mitka, I. (2019). Interpretive Structural Modeling Approach to Analyze the Interaction Among Key Factors of Risk Management Process in SMEs: Polish Experience. *European Journal of Sustainable Development*, 8(1), 339-339. doi:<https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n1p339>
- Hidayatullah, S., Windhyastiti, I., & Waris, A. (2021). Peran Daya Tarik Desa Wisata dan Community Based Tourism dalam Membangun Citra Desa Wisata. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMDK)*, 9(2), 246-253. doi:<https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.7071>
- Jayant, A., & Azhar, M. (2014). Analysis of the Barriers for Implementing Green Supply Chain Management (GSCM) Practices: An Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach. *Procedia Engineering*, 97, 2157-2166. doi:<https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.459>
- Juliyanti, Syarifuddin, & Rahmawati, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Pantai Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 128-136.
- Kumar, A., & Singh, V. (2019). Overview of Interpretive Structural Modeling. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 4(5), 536-540. doi:<https://doi.org/10.33564/ijeast.2019.v04i05.078>
- Latupapua, C. V., Hiariey, H., Atamimi, R., Latuhamallo, J., & Latuconsina, Z. (2022). Edukasi Masyarakat Negeri Sawai: Optimalisasi Potensi Usaha di Desa Wisata Berbasis Ekonomi Biru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13-19. doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4192>
- Maeyangsari, D. (2023). Blue Economy as a Sustainable Development Effort and Fulfillment of Human Rights. *Perspektif hukum*, 23(1), 106-126. doi:<https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172>
- Ndjurumbaha, V. Y., Tiwu, M. I., & Ballo, F. W. (2024). Peran Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 46-55. doi:<https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.366>

- Orajekwe, J. C., & Ogbodo, O. C. (2023). Firm-Specific Characteristics and Environmental Disclosure of Energy Firms in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(2), 251-264. doi:<https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i2.1601>
- Pradana, S. A., Irawan, H., & Bestari, P. (2024). KADARKUM: The Legal Awareness Program for Enhancing Citizen Engagement in Supporting Rural Development. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 5(2), 145-157. doi:<https://doi.org/10.35912/joste.v5i2.1723>
- Rusydiana, A. S. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-17. doi:<https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771>
- Siregar, D., Daulay, A., Sabrina, H., Aramita, F., & Tarigan, E. D. S. (2024). Pengaruh Manajemen Kewirausahaan terhadap Daya Saing UMKM di Sektor Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 1201-1208. doi:<https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.3037>
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2021). *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sverdan, M. (2021). The Blue Economy: A New Trend in Social Development. *Green, Blue and Digital Economy Journal*, 2(3), 49-56. doi:<https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-8>
- Tegar, D., & Gurning, R. O. S. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 2(2), 128-132. doi:<https://doi.org/10.12962/j25481479.v2i2.3650>
- Wardono, B., Muhartono, R., Hikmayani, Y., Apriliani, T., & Hikmah. (2019). Analisis Prospektif Peran Aktor dalam Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 179-195. doi:<http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8241>
- Wibawa, M. I., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Kewirausahaan Terhadap Kualitas Destinasi Wisata Pura Taman Ayun. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(4), 1051-1078. doi:<https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p07>
- Yahya, Z. A. (2016). Potensi dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Ketawang di Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. *Geo Educasia*, 1(4).
- Yopie, S., & Febriana, H. (2024). Analyzing Project Management Trends in Indonesia: 2018-2023 International Literature Review. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 6(2), 197-215. doi:<https://doi.org/10.35912/ijfam.v6i2.1836>
- Zhou, Q., Ma, X., Lei, L., & Jun, G. (2024). Research on the Hierarchical Structure of User Feature Factors Affecting the Accurate Recommendation of Digital Educational Resources. *International Journal of Information and Education Technology*, 14(4), 620-625. doi:<https://doi.org/10.18178/ijiet.2024.14.4.2085>
- Zulaecha, H. E., & Murtanto, M. (2019). Foreign Ownership and Sustainability Performance in Indonesia. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 1(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.35912/ijfam.v1i1.39>